



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 telp. (031)3524001 - 33524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Nomor : 861.1 / 1735 / 204.3 / 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Surat
Perihal : Pelaksanaan Uji Coba Layanan
Online Unit Layanan Administrasi
Kementerian Dalam Negeri.


Kepada
Yth.Sdr. 1. Bupati / Walikota se Jawa Timur;
2. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan / Dinas / Kantor
Provinsi Jawa Timur;
4. Sekretaris DPRD / KPU / Dewan
Pengurus Provinsi Jawa Timur;
5. Direktur Rumah Sakit di
lingkungan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/9268/SJ tanggal 18 Desember 2017 perihal pada pokok surat dimaksud (copy surat) terlampir.

Bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka mempercepat, efektivitas, efisiensi dan transparansi pengurusan layanan administrasi dan layanan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, telah dibangun 3 (tiga) jenis layanan berbasis *Online*, yaitu : Pendaftaran/Registrasi Layanan Konsultasi, Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri(PDLN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah, dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Layanan *Online* pendaftaran/registrasi konsultasi diperuntukkan bagi pengguna layanan yang ingin berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan pendaftaran secara *Online* 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan, sedangkan layanan administrasi Rekomendasi PDLN bagi ASN Pemerintah daerah dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian diperuntukkan bagi pengguna layanan dengan mengajukan secara *Online* berkas PDLN melalui website : <http://ula.kemendagri.go.id>, dan seluruh berkas pengajuan penelitian sesuai persyaratan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah


Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM
Pembina Utama
NIP. 19580714 198503 1 014



KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	18-01-2018	NOMOR
WAKTU	10:00	
PARAF		0038/k

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 2017

Nomor : 061/9268/SJ

Yth. Gubernur

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pelaksanaan uji coba layanan
online Unit Layanan Administrasi
Kementerian Dalam Negeri

di

Seluruh Indonesia

Dengan hormat disampaikan, bahwa dalam rangka mempercepat, efektivitas, efisiensi dan transparansi pengurusan layanan administrasi dan layanan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, telah dibangun 3 jenis layanan berbasis *online*, yaitu: Pendaftaran/Registrasi Layanan Konsultasi, Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah, dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Layanan *online* pendaftaran/registrasi konsultasi diperuntukkan bagi pengguna layanan yang ingin berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan pendaftaran secara *online* 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan, sedangkan layanan administrasi Rekomendasi PDLN bagi ASN pemerintah daerah dan Penerbitan rekomendasi penelitian diperuntukkan bagi pengguna layanan dengan mengajukan secara *online* berkas PDLN, dan berkas pengajuan penelitian sesuai persyaratan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.

Dalam 3 (tiga) bulan ke depan, akan dilakukan uji coba penerapan aplikasi *online* tersebut, untuk itu diminta kepada Saudara menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang ingin melakukan perjalanan dinas luar negeri dan kepada masyarakat yang ingin melakukan penelitian serta ingin berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri agar mendaftar dan menyampaikan berkas secara *online* melalui: <http://ula.kemendagri.go.id>. Apabila dalam penerapan aplikasi tersebut mengalami permasalahan dapat menghubungi layanan pengaduan di nomor 021-3450038 ext. 2638, 2635.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal,

Drs. Hadi Prabowo, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia